

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S., & Retrinasari, I., 2007, *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*, Proceeding Seminar Nasional, Pp 1-16.
- Budiriyanto, E., 2013, Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Disharmonisasi Peraturan Perundangan, Artikel Kemenkeu (Internet). http://djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf (diakses 13 Mei 2016).
- Creswell, J. W., 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition, SAGE Publications, California.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta.
- Da Crus, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., & de Sausa, L., 2015. *Measuring Local Government Transparency*, Article Public Management, Pp 1-28.
- Hermana, B., & Tarigan, A., Medyawati, H., Silfianti, W., 2012, *E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web*, 3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR vol.27, Pp 194-199.
- Halim, A., & Bawono, I. R., 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A., 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indrianto, N., & Supomo, B., 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Indonesia Governance Index (IGI), 2012. *Towards A Well-Informed Society And Responsive Government: Executive Indonesia Governance Index 2012*, <http://kemitraan.or.id/igi/documents/data/IGI%20Executive%20Report.pdf/> (diakses tanggal 20 Januari 2012).
- Indonesia Governance Index (IGI), 2014. *Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014*, http://kemitraan.or.id/sites/default/files/Executive%20Summary%20IGI%20-%2034%20DistCities%20214_0.pdf/ (diakses tanggal 20 Januari 2016).
- International Budget Partnership (IBP), 2015. *Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live*. <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>. (diakses tanggal 10 Juni 2016).

- Martani, D., Fitriasari, D., & Annisa., 2014, *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia*, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 60, Pp 504-516.
- Moleong, L. J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Ritonga, I, T., & Suhartono, E., 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah)*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta.
- Ritonga, I, T., 2014, *Analisis Laporan Keuangan Pemda*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 17 tentang *Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 1 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 15 tentang *Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara*,
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 14 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Soewadji, Y., 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Suwardjono., 2014, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

UNDP, 2008, *A Users' Guide to Measuring Local Governance*, UNDP Oslo Governance Centre, Pp 1-146

<http://bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=16687/> (diakses tanggal 13 Oktober 2015).

<http://m.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2012/03/06/72168/mahasiswa-demo-penggunaan-anggaran-dinas-perjalanan/> (diakses tanggal 13 Oktober 2015).

<http://inilahbanten.com/2014/10/25/desak-transparan-soal-temuan-bpk-aksidemo-imm-gembok-pagar-pendopo/> (diakses tanggal 13 Oktober 2015).

<http://bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/577/Keuangan-Daerah/> (diakses tanggal 20 Nopember 2015).

<http://jogjakota.go.id/> diakses tanggal 11 April 2016.

<http://bantulkab.go.id/> diakses tanggal 11 April 2016.

<http://slemankab.go.id/> diakses tanggal 11 April 2016.

<http://gunungkidulkab.go.id/> diakses tanggal 11 April 2016.

<http://kulonprogokab.go.id/> diakses tanggal 11 April 2016.